

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

Narasumber 1

Nama : Dra. Tutuk Mei Rahayuningsih

Jabatan : Plt. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan
Bencana dan Kepahlawanan

Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Tuban

Waktu : Kamis, 25 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada regulasi dalam program BPNT untuk masyarakat?	Saya regulasi atau peraturan yang mendasari program BPNT itu ada “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai” dari kementerian itu ada “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga” dan “Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan” kurang lebih itu.
2.	Sejak kapan adanya program bantuan BPNT ?	Program (BPNT) itu diterapkan pada awal tahun 2017 yang secara bertahap melakukan reformasi dari program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT ini salah satu dari program diantara program-program

		<p>bansos pemerintah yang lain, program ini disalurkan dalam bentuk Non Tunai dari pemerintah kepada (KPM) setiap bulannya dengan berasaran Rp. 110.000 yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang bekerja sama dengan bank penyalur atau disebut juga dengan e-warong. Bahan yang dimaksud berupa sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu) ada protein hewani juga seperti (telur, daging ayam, ikan) protein nabati juga ada (tempe, telur), tidak bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Namun, ketika memasuki tahun 2020 terjadi perubahan regulasi dibulan Januari dan Februari menjadi Rp. 150.000, kemudian masuk bulan maret sampai seterusnya tambah lagi menjadi Rp. 200.000 dan variasi pembelanjannya dari nabati, hewani, vitamin dan mineral dan penerima KPM bisa bebas memilih apa yang ingin diambil. Berbeda dengan sebelum masuk tahun 2020 hanya bisa dibelanjakan hanya beras dengan telur saja.</p>
<p>3.</p>	<p>Apa yang menjadi kewenangan Dinas Sosial dalam program Bantuan BPNT ? apakah mempunyai wewenang untuk menentukan siapa</p>	<p>Kewenangan Dinas Sosial dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu monitoring terhadap penyaluran Kartu KKS dari Bank BNI yang di berikan kepada KPM (keluarga Penerima Manfaat) yang di kumpulan oleh pihak Pemerintah Desa terkait, selain itu monitoring yang di lakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya fokus terhadap</p>

	<p>saja yang berhak mendapatkan bantaun ?</p>	<p>penyaluran karut KKS dan Kesesuaian target penerimanya tetapi juga memonitoring Agen E-warung yang bekerja sama dengan Bank BNI dan menjadi tempat KPM untuk menukarkan sembako sesuai uang senilai Rp. 110.000 yang di terima oleh KPM per bulannya. Dinas sosial ketika menyalurkan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat turun langsung untuk mengadakan sosialisasi dan mengajarkan bagaimana tatacara menggunakan kartu tersebut. Saya, sendiri yang turun langsung menjelaskan prosedur-prosedurnya.</p> <p>Dinas sosial tidak berhak menentukan siapa saja nama-nama yang berhak dapat bantaun. Dinas sosial hanya menerima usulan nama-nama dari masing-masing pemerintah desa kemudian nanti kita akan inputan data-data ke aplikasi SIKS-NG. Nanti secara otomatis masuk ke nama-nama DTKS. Nah, dari DTKS itu yang tentukan orang ini berhak dapet dari Kementerian Soial. Jadi, itu nanti kita tugasnya menyalurkan kemasyarakat yang namanya ada di KPM BPNT.</p>
<p>4.</p>	<p>Bidang apa yang memiliki kewenangan dalam program bantuan BPNT ini?</p>	<p>Bidang di Dinas Sosial yang memiliki kewenangan terhadap Program BPNT adalah Bidang Linjamsos yang di pimpin oleh Dra. Tutuk Mei Rahayuningsih selaku Plt. Kabid Bidang Linjamsos.</p>

5.	Apakah ada pengawasan dalam Program bantuan BPNT ? Bagaimana proses pengawasan tersebut apakah terdapat kendala ?	Ada, kami (Dinas Soisal) dibantu oleh TKSK dan pendamping PKH dalam pengawasan terhadap KPM yang menerima bantuan BPNT, kalo ada masalah di desa tenaga tenaga itu yang membantu menyelesaikan. Contoh masalah yang terjadi itu NIK tidak padan, karna NIK Integrasi, yang awalnya dikelola Daerah sekarang terpusat jadi banyak sekali NIK yang tidak padan akhirnya di bantu oleh TKSK dan pendamping PKH untuk memadankan NIK nya, selain itu kartu KKS hilang, salah memberikan kartu KKS kepada penerima, itu semua yang menyelesaikan di bantu oleh TKSK dan pendamping PKH.
6.	Apakah program bantuan sosial sudah sesuai dengan target?	Dari kami selaku Dinas Sosial kalau terkait untuk memastikan kesesuaian target sebenarnya kami nantinya akan menerima laporan dari pemerintah desa saja. Diawal kami sesuaikan masyarakat yg menerima bantuan sesuai dengan data DTKS dan dari pemerintah pusat.
7.	Apakah dari Dinas Sosial terdapat evaluasi setelah pelaksanaan pendistribusian mengalami masalah ?	Pasti ada evaluasi, evaluasinya yang pertama menekankan kepada bank untuk lebih selektif pada saat penyaluran Kartus KKS itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, yang kedua kita (Dinas Sosial) tidak henti hentinya untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak menguntungkan agen E-warung karna

		memberikan biaya admin sebesar Rp.5000 padahal biaya admin untuk agen itu cuma Rp.1000.
8.	Bagaimana terkait adanya penyelewengan dana bantuan BPNT yang pernah terjadi di Desa Cepokorejo?	Jadi selain adanya kendala atau permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi mas, memang pernah terjadi kasus penyelewengan dana dari salah satu perangkat desa di Cepokorejo. Jadi kasus penyelewengan itu terjadi pada tahun 2018, dana yang diambil itu dari dana bantuan BPNT dari 60 orang warga disana mas. Kasus ini terjadi juga karna kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah desanya, jadi sangat mudah untuk terjadinya kasus penyelewengan dana ini. Tapi setelah adanya kasus itu, dari kami selalu memperbaiki sistem dan membuat transparansi dari semua proses sampai pencairan dana bantuan BPNT tersebut.

Narasumber 2

Nama : Bapak Yakur

Jabatan : Kepala Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Tempat : Kantor Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Waktu : Selasa, 23 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah di pemerintah desa ada regulasi yang mengatur tentang pendistribusian program bantuan BPNT ? (Adanya regulasi mungkin berupa PERDES/SK Lurah dsb)	Untuk regulasi atau peraturan dari Pemerintahan Desa untuk BPNT tidak ada karena peraturan dari pusat semua seperti Perpres (Peraturan Presiden dan Permen (Peraturan Kementrian). Hanya saja Pemerintah desa punya kewenangan sebagai pengawas dan penanggungjawab atas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai BPNT di desa cepokorejo.
2.	Regulasi atau peraturan apa yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan program bantuan BPNT ? (peraturan presiden/kementrian dsb)	Peraturan yang digunakan untuk landasan program itu menggunakan “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai” dari kementrian itu ada “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga”.
3.	Apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah desa dalam hal	Kewenangan Pemerintah Desa dalam program BPNT hanya untuk mendistribusikan surat berisi nama” dan nomor kartus KKS kepada KPM, tetapi

	<p>pendistribusian bantuan BPNT ?</p>	<p>untuk bansos yang lain seperti BLTDD itu yang menentukan kriteria penerima bantuannya Pemerintah Desa dan yang menentukan besaran BLTDD untuk penerima bantuan juga dari Pemerintah Desa, ada juga bantuan dari Polres, Dewan itu kita yang mendistribusikan.</p>
<p>4.</p>	<p>Bagaimana cara para elit politik di pemerintah desa menentukan penerima bantuan sosial (seperti apa kriteria masyarakat penerima bantuan)</p>	<p>Dalam hal mengenai masalah penentuan kuota penerima bantuan BPNT pemerintah desa tidak mengetahui dikarenakan jumlah kuota itu ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial. Pemerintah desa cepokorejo tidak bisa mendata siapa aja yang bisa menerima bantuan BPNT karna pemerintah desa Cepokorejo memperoleh data-data penerima BPNT dari Dinas Sosial yang mengacu pada DTKS yang dikelola Kementerian Sosial, hanya saja pemerintah desa cepokorejo bisa mengajukan atau mengusulkan nama-nama masyarakat ke Dinas Sosial untuk menerima bantuan BPNT ke DTKS namun tidak bisa memastikan apakah masyarakat tersebut dapat menerima bantuan BPNT. Kalau tentang pendataannya sudah ada sejak lama dari prorgam-program sebelumnya itu sudah dari tahun-tahun lalu, pasti diantara masyarakat sudah ada yang meningkat kondisi ekonominya dan begitu juga sebaliknya yang dulunya lebih dari cukup</p>

		tapi mungkin saja sekarang tidak bercukupan lagi
5.	Bagaimana Proses pendataan untuk penerima program BPNT?	Dalam tahap pendataan biasanya kita menyiapkan data penerima program BPNT yang dilakukan pengumpulan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang dirasa membutuhkan bantuan, lalu diusulkan nama-nama calon daftar penerima bantuan untuk di masukan ke aplikasi SIKS-NG.
6.	Apakah penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan target?	Penyaluran program BPNT kepada masyarakat terbilang memenuhi target, tetapi biasanya ada masyarakat yang mendapatkan tetapi pas waktu pengambilan kartu tidak datang otomatis tidak diambil kartu KKS nya, kartu yang tidak diambil oleh masyarakat penerima bantuan di titipkan ke pemerintahan desa yang nantinya di ambil oleh masyarakat yang bersangkutan di kantor desa, selain itu untuk KPM yang sudah meninggal tetapi masih mendapatkan bantuan BPNT dapat di ambil oleh ahli waris dalam satu KK dengan penerima.
7.	Apakah sebelumnya pernah terdapat kendala dalam penyaluran bantuan BPNT tersebut? Kendala seperti apa?	Kendala yang pernah terjadi dalam penyaluran seperti adanya data yang tidak sesuai karna tiap bulannya kemiskinan meningkat masyarakat sering meminta diajukan untuk mendapatkan bantuan BPNT kepada Pemerintah Desa. Selain itu terdapat

		<p>data yang masih aktif mendapatkan bantuan BPNT tetapi penerimanya sudah meninggal hal itu menyebabkan bantuan tidak ada yang mengambil pada akhirnya dikembalikan lagi ke pihak distributor melalui pemerintah desa.</p> <p>Selain kendala yang pernah terjadi, pada tahun 2018 terjadi masalah penyalahgunaan kartu KKS di lakukan oleh sekretaris desa untuk kepentingan pribadi, total kartu yang di tahan oleh sekdes sebanyak 64 kartu KKS, awal mula kasus ini terjadi pada pendistribusian tahap 2 yang tidak diberikan langsung kepada penerima BPNT tetapi melalui perangkat desa yang kebetulan diterima oleh sekretaris desa, kartu yang seharusnya di berikan ke penerima BPNT tetapi tidak diberikan oleh sekdes sampai dua tahun lamanya sehingga menyebabkan masyarakat demo enam kali untuk meminta kartu itu dikembalikan kepada KPM dan meminta ganti rugi sebesar jumlah yang di ambil, selain itu masyarakat menginginkan sekretaris dicopot dari jabatannya dan di laporkan kepada pihak berwajib.</p>
<p>8.</p>	<p>Kendala atau masalah apa yang pernah dialami selama pelaksanaan program BPNT?</p>	<p>Kalo kendala dialapangan itu paling konumikasi ke masyarakat yang kurang efekti karna setiap ada informasi menegnai bantuan program BPNT pihak desa tidak dapat menginfomarikan ke semua masyarakat penerima, masyarakat tidak</p>

		<p>semuanya punya alat komunikasi. Selain kendala ada juga masalah bantuan program BPNT tidak diberikan kepada masyarakat dipakai sendiri oleh pak Sekretaris desa, sehingga sebanyak 64 orang penerima bantuan itu tidak mendapatkan akhirnya waktu itu pak Sekdes saya lepas dari jabatannya, karna sudah menyalahgunakan dana bantuan program BPNT dan masyarakat tidak menerima kartu itu hampir selama satu setengah tahun,</p>
<p>9.</p>	<p>Evaluasi Pemerintah desa terhadap program BPNT ?</p>	<p>Setelah adanya kejadian seperti yang saya jelaskan tadi, kami melakukan banyak perbaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program BPNT, mulai dari melakukan pembagian kartu dengan extra hati hati, jangan sampe kartu diambil sama orang yang lain atau tidak sesuai dengan data, sekarang kalo masyarakat mau ambil kartu di kantor desa ada foto bukti pengambilannya, dan pengambilan harus diketahui oleh saya karna desa cepokorejo diawasi ketat setelah ada kejadian kasus waktu itu.</p>

Narasumber 3

Nama : Bapak Putro Sazyanus

Jabatan : Sekretaris Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Tempat : Kantor Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Waktu : Selasa, 23 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Proses pendataan untuk penerima program BPNT?	Dalam hal mengenai masalah penentuan kuota penerima bantuan BPNT pemerintah desa tidak mengetahui dikarenakan jumlah kuota itu ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial namun, untuk pendataan semua instansi mendata dan dari BPS (badan pusat statistik) juga mendata mendatangi tiap rumah orang miskin dimintai KK, KTP, menulis harta kekayaan, selain itu untuk program BPNT mengacu pada data DTKS yang di kelola olehh Kementeria Sosial.
2.	Apakah implementasi penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan target?	Program BPNT di desa cepokorejo tepat sasaran mas, karna masyarakat yang menerima program BPNT itu nama-namanya dari pemerintah desa yang mengusulkan ke dinas sosial”.
3.	Apakah sebelumnya pernah terdapat kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut? Kendala seperti apa?	Biasanya kendala yang sering terjadi dari cara penyampaian ke masyarakat mengenai penyaluran kartu KKS yang biasanya masyarakat lupa mengambil akhirnya kartu KKS yang tidak diambil oleh masyarakat di bawa oleh pemerintah desa yang nanti nya

		<p>masyarakat mengambil di kantor desa. Selain itu data DTKS yang jarang di perbaharui, kartu KKS rusak, saldo nol dan dana bantuan yang disediakan cukup banyak. Ada juga masyarakat yang tidak keluar dananya, setehal dicek ternyata ada yang salah, contohnya itu seperti salahnya penulisan nama antara dikartu tanda penduduk dan kartu keluarga sejahtera ha sepele gitu biasanya terkadang menyebabkan dananya tidak keluar.</p>
--	--	--

Narasumber 4

Nama : Ibu Anda Juwita

Jabatan : Masyarakat Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Tempat : Rumah Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Waktu : Selasa, 23 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa Cepokorejo?	Waktu itu saya diusulkan langsung dari pihak pemerintah desa dan dimintai mengumpulkan fotocopy KK dan KTP untuk digunakan sebagai persyaratan administrasi calon penerima bantuan, setelah itu saya menunggu beberapa minggu saya di panggil oleh pemerintah desa lalu diberikan kartu untuk digunakan pengambilan barang di e-warong.
2.	Apakah terdapat transparansi data penerima bantuan?	Saya kurang tau soal transparansi datanya soalnya waktu itu setelah mengumpulkan fotocopy KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan saya langsung pulang karena sudah tidak ada kepentingan, jadi sampai sekarang saya kurang tau siapa aja yang menerima bantuan di desa cepokorejo.
3.	Apakah pendistribusian sudah sesuai dengan target dan apa manfaat dari program BPNT?	Saya mendapatkan bantuan BPNT semenjak tiga tahun lalu dengan berbagai macam bahan pangan yang diberikan seperti: beras, tempe, telur, tahu, beras, minyak dan bahan sembako lainnya, itu semua dibeli menggunakan uang yang berikan oleh pemerintah melalui program BPNT sehingga dapat meringankan beban pengeluaran keluarga. Akan tetapi tidak sertamerta saya sebagai penerima bantaun BPNT lalu dapat dikatakan sejahtera,

		tetapi setidaknya membantu mengurangi pengeluaran keluarga walaupun sedikit.
4.	Apakah proses pencairan bantuan mudah dilakukan?	Selama saya mencairkan bantuan di agen alhamdulillah tidak ada masalah apa apa prosesnya lancar
5.	Apakah menurut anda proses pendistribusian yang dilakukan pemdes sudah efektif dan efisien?	<p>Menurut saya pendistribusian ke masyarakat kurang efektif karna terkendala dengan komunikasi antara masyarakat dengan perangkat desa, masyarakat yang menerima bantuan tidak semua punya atal komunikasi yag menjadikan kendala bagi masyarakat penerima tidak mengetahui perkembangan dan informasi-informasi seputar bantuan sosial, karna bagi msasyarakat konumikasi itu penting kalo masyarakat tidak tau apa-apa mengenai bantuan yang masyarakat dapat itu yang bahaya karna bisa jadi bantuan yang seharusnya di bagikan ke masyarakat malah di ambil sendiri atau dikorupsi.</p> <p>Soalnya waktu itu pernah ada kasus awal mula terjadi pada pencarian tahap pertama sampek beberapa tahap bantuan tidak keluar sama sekali karna saya tidak tau informasi apa-apa mengenai program BPNT jadi saya pikir belum ada pencairan waktu itu, tau tau kantor desa rame ada masyarkaak demo karna ada kasus korupsi.</p>

6.	Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan pemdes dalam hal pendistribusian bantuan sosial?	Kalo menurut saya komunikasi kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan lagi, masyarakat banyak ketinggalan informasi karena komunikasi perangkat desa dengan masyarakat yang kurang, kalo komunikasi lancar pasti dari msyarakat juga tau perkembangan bantuan apa yang masuk di desa selain itu ada program apa yang bisa masyarakat ikuti.
-----------	---	--

Narasumber 5

Nama : Ibu Sukilah

Jabatan : Masyarakat Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Tempat : Rumah Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Waktu : Selasa, 23 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa Cepokorejo?	Sebelum saya menerima bantuan program BPNT saya di mintai fotocopy KK dan KTP sebagai persyaratan untuk diusulkan menjadi menerima bantuan, setelah itu saya mendapatkan bantuan dan diberikan kartu yang digunakan untuk mencairkan uang berbentuk sarang di e-warong,
2.	Apakah terdapat transparansi data penerima bantuan?	Menurut saya peerangkat desa disini kurang transparan soal data penerima bantuan karena sebelumnya pernah di minta oleh salah satu masyarakat pemerintah desa jawabnya tidak punya data penerima bantuan,
3.	Apakah pendistribusian sudah sesuai dengan target dan apa manfaat dari program BPNT?	Pelaksanaan program bantuan BPNT ini masih terdapat kurang tepat sasaran, karna ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karna belum terdata, tetapi katanya akan ada pemabahan data tapi sampai saat ini belum ada penambahan lagi
4.	Apakah proses pencairan bantuan mudah dilakukan?	menurut saya proses pencairannya kurang tepat waktu hal ini dikarnakan informasi dari pihak pemerintah desa yang itu tidak tentu tiap bulanya kadang cair dipertengahan bulan kadang di akhir-akhir bulan.

5.	Apakah menurut anda proses pendistribusian yang dilakukan pemdes sudah efektif dan efisien?	<p>Untuk pendistribusian menurut saya kurang efektif, selain penyalurannya kepada masyarakat kurang merata karna ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karna belum terdata, awal pencairan tahap pertama sudah ada kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, kalo ga salah kasusnya terjadi pada tahun 2018 awal kurang lebih hampir satu tahun setengah bantuan tidak keluar sama sekali gara-gara kasus. Masyarakat penerima lainnya juga merasakan hal yang sama seperti saya, setelah melakukan protes namun tak ada hasil akhirnya masyarakat penerima bantuan yang merasa dirugikan melakukan unjuk rasa dikantor pemerintah desa dan di Dinas Sosial Kab. Tuban meminta untuk pelaku kasus penyelewengan uang bantuan di copot dari jabatannya dan di tindak lanjut ke ranah hukum dan mengembalika hak masyarakat penerima bantuan program BPNT.</p>
6.	Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan pemdes dalam hal pendistribusian bantuan sosial?	<p>Menurut saya dari segi komunikasi dengan masyarakat, karena setiap ada program bantuan buat masyarakat yang membutuhkan kita gapernah tau mas, tau tau udh ada yang menerima tapi ga semuanya dapet jadi bisa di bilang penyalurannya juga kurang merata,</p>

Narasumber 6

Nama : Ibu Warimi

Jabatan : Masyarakat Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Tempat : Rumah Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Waktu : Selasa, 23 Januari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa Cepokorejo?	Di cepokorejo pendataan penerima Bantuan pangan non Tunai kurang sesuai mas sehingga disini terdapat kecemburuan sosial, karna Ibu Sumini yang seharusnya mendapatkan bantuan karna kondisi ekonominya tergolong miskin tapi tidak mendapatkan bantuan, justru malah keluarga yang ekonominya terbilang cukup dan mampu mendapatkan bantuan, biasanya juga keluarga yang masih kerabat dengan perangkat desa bisa mendapatkan bantuan. Tetapi saya dengar dari perangkat desa katanya akan ada penambahan data penerima bantuan itu tapi kenyataanya sampai sekarang belum ada terlaksana
2.	Apakah terdapat transparansi data penerima bantuan?	dari awal adanya program bantuan ini masyarakat penerima bantuan seperti kami gatau apa apa mas, jarang ada informasi tentang program bantuan dari pemerintah desa jadi masyarakat penerima bantuan gatau soal data penerimanya itu siapa saja,
3.	Apakah pendistribusian sudah sesuai dengan target	Penyaluran program bantuan BPNT ini menurut saya masih terdapat kurang tepat sasaran, karna ada masyarakat yang

	dan apa manfaat dari program BPNT?	seharusnya dapat bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karna belum terdata, kalo manfaat yang di dapatkan masyarakat penerima bantuan dari program bantuan ini bahan-bahan pokok buat kebutuhan sehari hari, lumayan buat mengurangi biaya keluarga buat beli bahan-bahan pokok.
4.	Apakah proses pencairan bantuan mudah dilakukan?	Alhamdulillah prosesnya lancar dan tidak ada masalah apa apa, cuman biasanya kebutuhan yang di butuhin masyarakat penerima bantuan tidak ada di tempat pencairan atau pengambilan manfaat progam bantuan, jadi mau gamau harus beli sendiri di toko lain menggunakan uang pribadi.
5.	Apakah menurut anda proses pendistribusian yang dilakukan pemdes sudah efektif dan efisien?	Kalo menurut saya pendistribusian program belum efektif karna program tersebut seharusnya keluar setiap bulan sekali tetapi saya pernah tidak mendapatkan bantuan program BPNT selama hampir setengah tahun karna ada kejadian kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, , saya kira memang belum waktunya percairan karna tidak ada informasih atau pengumuman soal bantuan program BPNT, pertama kali saya mendapatkan bantuan tahun 2019 akhir. Dampak yang saya rasakan waktu adanya kasus korupsi dana bantuan program BPNT, saya tidak mendapatkan bantuan selama kurang lebih setahun setengah, tidak ada bantuan dari pemerinta menyebabkan beban

		<p>pengeluaran keluarga meningkat yang biasanya sebulan cuma mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak sekolah tetapi mengeluarkan uang untuk kebutuhan dapur karena harus membeli beras, minyak, dan bahan-bahan pokok lainnya, seharusnya masyarakat miskin terbantu dengan adanya bantuan program BPNT karena mengurangi beban pengeluaran keluarga tetapi adanya kasus korupsi itu membuat masyarakat miskin semakin terpuruk.</p>
<p>6.</p>	<p>Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan pemdes dalam hal pendistribusian bantuan sosial?</p>	<p>Menurut saya masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari perangkat desa disini, soalnya sebelum sebelumnya banyak masalahnya mulai dari korupsi, bantuan yang di kasih ke orang orang terdekat saja dll, kalo menurut saya ditingkatkan dari segi komunikasi ke masyarakat supaya masyarakat tau perkembangan program yang masuk ke desa itu apa saja yang bisa diikuti, selain itu pengawasan gimana caranya biar masalah yang sudah pernah terjadi biar ga terjadi lagi</p>

Narasumber 7

Nama : Ibu Suliah

Jabatan : Masyarakat Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Tempat : Rumah Penerima Program BPNT Desa Cepokorejo

Waktu :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa Cepokorejo?	Yang saya tahu pendataan penerima Bantuan kurang sesuai mas sehingga disini terdapat kecemburuan sosial, karna masih terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan karna kondisi ekonominya tergolong miskin tapi tidak mendapatkan bantuan, justru malah keluarga yang ekonominya terbilang cukup dan mampu mendapatkan bantuan, biasanya juga keluarga yang masih kerabat dekat perangkat desa bisa mendapatkan bantuan.
2.	Apakah terdapat transparansi data penerima bantuan?	Engga ada setahu saya, masyarkat gapernh denger siapa aja yang nerima terus datanya ada berapa orang kurang tahu. Soalnya masyarakat tau ya pas waktu pengambilan pencairan di agen siapa yang ke agen buat cairin ya itu yang mendapatkan bantuan
3.	Apakah pendistribusian sudah sesuai dengan target dan apa manfaat dari program BPNT?	Kalo menurut saya kurang sesuai, soalnya saya denger dari tetangga masih banyak yang belum mendapatkan bantuan, kalo manfaatnya alhamsulilah bisa membantua masyarkat penerima bantuan buat mengurangi pengeluaran harian maupun bulangan

4.	Apakah proses pencairan bantuan mudah dilakukan?	Sejauh ini tidak ada masalah apa apa selama saya mencairkan bantuan dari pemerintah, prosesnya juga cepet cuman ya ada bahan bahan yang kita cari tetapi kita tidak menemukannya di agen tersebut.
5.	Apakah menurut anda proses pendistribusian yang dilakukan pemdes sudah efektif dan efisien?	Sejak program ini diperkenalkan, saya sangat senang sekali karna akan membantu keluarga kami yang kurang mampu. Kami bisa mendapatkan bantuan pangan secara langsung melalui kartu yang diberikan. Tetapi menurut saya penditribusiannya kurang efektif biasanya telat dan lain sebagainya, waktu itu pernah saya tidak mendapatkan bantuan karna ada kasus korupsi yang terjadi di program ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk memberikan bantuan kepada keluarga seperti kami, ternyata telah disalahgunakan oleh salah satu perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kami sering kali tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya kami terima. saya dengan keluarga merasakan dampak yang sangat besar. Bantuan tersebut sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama makanan. Tanpa bantuan ini, kami sering kali kesulitan untuk membeli bahan makanan yang cukup untuk keluarga kami. Saya dan masyarakat lainnya yang menerima bantuan program BPNT merasa frustrasi dan terpinggirkan karena

		<p>korupsi ini, waktu itu saya bersama dengan masyarakat yang lain meminta untuk pelaku kasus penyelewengan uang bantuan di copot dari jabatannya dan di tindak lanjut ke ranah hukum.</p>
<p>6.</p>	<p>Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan pemdes dalam hal pendistribusian bantuan sosial?</p>	<p>menurut saya komunikasi kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan lagi, masyarakat banyak ketinggalan informasi karena komunikasi perangkat desa dengan masyarakat yang kurang, jadi masyarakat jarang ikut acara desa. kalo komunikasi dengan masyarakat lancar pasti dari masyarakat juga tau perkembangan bantuan apa yang masuk di desa selain itu ada program apa yang bisa masyarakat ikuti dan bakal selalu mengikuti acara desa karena kita merasa dibutuhkan.</p>

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Plt. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Kepahlawanan Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Ibu Dra. Tutuk Mei Rahayuningsih



Wawancara dengan Kepala Desa Cepokorejo. Bapak Yakur



Wawancara dengan Sekretaris Desa Cepokorejo. Bapak Putro Sazyanus



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Cepokorejo. Bapak Warno



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Cepokorejo. Ibu Anda Juwita



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Cepokorejo. Ibu Sukilah


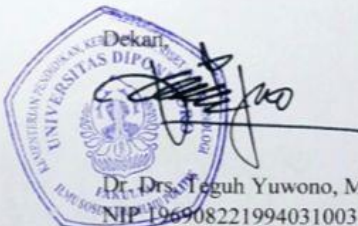


Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Cepokorejo. Ibu Warimi



Dokumentasi Kartu Program BPNT milik salah satu masyarakat penerima program BPNT Desa Cepokorejo

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	<small>Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang Kode Pos 50275 Telepon/Faksimile (024) 7465407 Laman: www.fisip.undip.ac.id Pos-el: fisip[at]undip.ac.id</small>
	UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
Nomor : <i>905 /UN7.F7/PP/1/2024</i>		22 JAN 2024
Lampiran :		
Perihal : Permohonan Izin Penelitian		
 Yth. Kepala Desa Cepokorejo Jl. Krajan, Randu Geneng, Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur		
Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bapak Yaskur selaku Kepala Desa Cepokorejo dan Bapak Putro Sazyanus selaku Sekretaris Desa Cepokorejo. Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:		
Nama	: Moch. Rasyiful Ulum Ghufron	
NIM	: 14010120140121	
Judul	: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Elit Lokal (Studi Kasus Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	
Alamat Rumah	: Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur	
Alamat email	: rasyif00@gmail.com	
No. HP	: 082333857710	
Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.		
 Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin NIP.196908221994031003 / f		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fkip.undp.ac.id
Pos-el: fkip[at]undp.ac.id

Nomor : 906/UN7.F7/PP/1/2024
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 JAN 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 36, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Ibu Dra. Tutuk Mei Rahayuningsih selaku Plt. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Kepahlawanan.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Moch. Rasyiful Ulum Ghufro
NIM : 14010120140121
Judul : Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Elit Lokal (Studi Kasus Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)
Alamat Rumah : Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Alamat email : rasyif00@gmail.com
No. HP : 082333857710

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

SEPAISI

(Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal)
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Scan Qr Code untuk melihat keaslian dan keutuhan surat dengan aplikasi Tuban Smart City



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 36 Tuban 62314, Telepon (0356) 332740
Laman dinsosp3a-pmd.tubankab.go.id, Pos_el dinsosp3atuban@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/ 163 /414.105.3/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUGENG PURNOMO, SIP.,MM
NIP : 19670103 198809 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, P3A serta PMD Kabupaten Tuban.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa UNDIP Semarang tersebut dibawah ini :

Nama : MOCH. RASYIFUL ULUM GHUFRON
NIM : 14010120140121
Progdi : Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Diponegoro

Telah melaksanakan riset/ penelitian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, guna mengumpulkan data untuk Menyusun skripsi dengan judul "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Elite Lokal Kabupaten Tuban (Studi Kasus di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGENG PURNOMO, S.IP., MM.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TUBAN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE** (Balai Sertifikasi Elektronik)

